



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD MURSYID
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 82720

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 745.000.000

1. Tanah Seluas 339 m2 di KAB / KOTA BARITO UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 445.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BARITO UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BARITO UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 135.487.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.487.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 599.691.020

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.480.178.020

III. HUTANG

Rp. 156.011.744

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.324.166.276

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.